



RESENSI BUKU

Judul : Menelisik Anggaran Publik

Penulis : Edy Barlianto

Penerbit: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

Kolasi : xiii + 213 halaman

ISBN : 979-9381-06-2

Jika Kuli Tinta Ungkap Anggaran Pemerintah

Kerap kali, peneliti mengalami tantangan tatkala melakukan riset terkait kebijakan publik. Mekanisme penelitian yang berbelit dan responden birokrat yang terkesan enggan memberikan keterangan adalah tantangan yang sering dijumpai dalam penelaahan dan evaluasi kebijakan pemerintah terlebih jika permasalahan yang diteliti tergolong sensitif. Isu sensitif seperti transparansi anggaran publik adalah isu dengan tantangan pengumpulan data yang berat.

Metode pengumpulan data terkait transparansi penganggaran pemerintah diungkap Edy Barlianto, jurnalis Harian Bisnis Indonesia, dalam buku yang bertajuk *Menelisik Anggaran Publik*. Buku yang terbit pada 2012 ini dijabarkan dengan alur yang runut, renyah dan gaya reportase investigasi selama kurun waktu penulis bertugas sebagai wartawan yakni dari tahun 1993 hingga 2008. Metode dan trik yang dilakukan penulis dapat diadopsi ke dalam pengumpulan data untuk penelitian mendalam terkait isu penganggaran pemerintah.

Pada bab pertama, penulis menjumpai tantangan-tantangannya dalam mengungkap anggaran daerah kendati penulis telah berpengalaman di bidang tersebut. Sejak awal menjadi wartawan, penulis memiliki ketertarikan besar terhadap hal-hal yang terkait penganggaran, neraca keuangan dan asuransi. Suatu ketika, penulis dipindahtugaskan untuk meliput isu-isu pemerintahan. Namun demikian, minat penulis tersalur melalui berita-berita anggaran pemerintah yang diliputnya.

Tantangan pertama yang dialami penulis yakni pola pikir birokrat saat itu, awal dekade 1990, yang masih menganggap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah barang tabu yang tidak boleh dibahas dengan sembarang orang dan dipublikasikan secara transparan. Pola pikir tersebut berimbas pada sulitnya mengakses buku APBD kendati transparansi APBD adalah hak publik. Resiko berlanjut berupa pembredelan media bahkan taruhan nyawa wartawan jika tulisan penganggaran yang diberitakan memperburuk citra pemerintah.

Dalam menyikapi resiko-resiko peliputan APBD, penulis menjalin kedekatan dan kepercayaan dengan beberapa birokrat publik dengan sering diskusi melalui kegiatan-kegiatan informal seperti makan siang bersama dan membicarakan hobi yang sama. Selain itu, pengurangan resiko pemberitaan isu sensitif juga dilakukan penulis dengan menggunakan diksi yang lebih halus, misalnya, menyusun judul dengan kalimat; *Pemangkasan Perda Pungutan Akan Dorong Realisasi Investasi*, padahal maksud penulis adalah *Perda Pungutan Perlu Dipangkas karena Menghambat Investasi*. Bagi penulis, dalam kondisi yang tidak menjamin adanya kebebasan pers, dalam mengungkapkan data yang sensitif, seorang penulis harus rela menahan diri untuk tidak terburu melepas isu anggaran di media masa sebelum memahami benar konteksnya lantaran anggaran merupakan produk tertinggi elit daerah yang sensitif jika dikritisi.

Setelah krisis ekonomi dan reformasi politik pada 1998, kran kebebasan pers terbuka lebih lebar. Reformasi politik 1998 membawa sejumlah konsekuensi yakni desentralisasi fiskal, munculnya undang-undang (UU) baru tentang otonomi daerah, dan melemahnya kondisi ekonomi negara. Melemahnya kondisi perekonomian berimbas pada menurunnya gaji wartawan termasuk gaji penulis. Kondisi tersebut tidak menyurutkan minat penulis dalam meliput berita penganggaran publik. Pada tahap ini, penulis justru menghasilkan lebih banyak tulisan investigasi anggaran publik pasca reformasi. Beberapa hal yang diungkap oleh penulis yakni kegamanan birokrat daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada pelaksanaannya, desentralisasi fiskal justru menumbuhkan raja-raja kecil daerah dengan menelurkan kebijakan-kebijakan perihal pungutan dan retribusi secara binal. Meski mekanisme penganggaran berubah dari kecenderungan mendanai aktivitas pemerintahan ke kebutuhan masyarakat, pungutan tersebut justru membawa akibat bagi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, berkurangnya daya beli masyarakat dan berkurangnya investasi.

Desentralisasi fiskal dijalankan dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilaksanakan dari tingkat desa, kecamatan, hingga SKPD di level kabupaten dan kota. Pada segmen implementasi, tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat di level musrenbang desa menjadi kegagalan yang lain dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Di segmen musrenbang kecamatan (musrenbangcam) hasil musrenbang di level desa tidak dibahas. Musrenbangcam berisi sosialisasi Rencana Strategis (Renstra), hasil Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang dicapai melalui Forum SKPD. Implementasi desentralisasi fiskal tersebut tidak sesuai dengan semangat desentralisasi fiskal yang telah mengalihkan dari mekanisme atas-bawah (*top down*) menjadi mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*).

Pada Forum SKPD yang menghadirkan Kepala Dinas justru bermuara pada kemana anggaran disalurkan, untuk konstituen siapa, dan kepentingan partai apa. Kepala Desa pada akhirnya hanya tahu di daerahnya akan diberi hibah proyek tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Menurut narasumber penulis, hal tersebut terjadi

karena di desa tersebut tidak memberikan banyak suara pada kandidat terpilih. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, dalam penjabarannya, penulis membeberkan sejumlah tabel dan grafik lengkap terkait data-data desentralisasi fiskal, Undang-Undang dan mekanisme pelaksanaannya dengan rinci. Seluruh data dan fakta tabu yang diungkap penulis tentang desentralisasi fiskal didapatkan dengan menjalin kepercayaan dengan birokrat publik melalui acara-acara informal yang dilakukan dalam waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Penulis merasakan salah satu tantangan dalam investigasi yakni melakukan pendekatan personal dengan birokrat publik dengan tanpa mengesampingkan hal prosedural dan aturan-aturan baku sesuai standar dan kode etik jurnanisme. Menurut penulis, laporan investigasi adalah sebuah rekonstruksi peristiwa. Rekonstruksi dibangun dengan fakta dalam proses pelaporan dan penempatannya harus tepat dan akurat agar gambaran yang didapatkan seperti aslinya. Cara yang dipakai dalam pengumpulan data investigasi yakni sama seperti metode kajian pada umumnya yakni dengan observasi diam-diam, wawancara khusus dengan sumber-sumber kunci dan telaah dokumen. Investigasi lebih bersifat penggalian terutama dokumen karena dapat dijadikan bukti otentik. Investigasi ini akan berguna bagi penyusunan kebijakan pemilihan temanya mempertimbangkan kepentingan umum yang dilibatkan, besarnya kasus, kedekatan dengan stakeholder, memiliki kemanusiaan yang tinggi, menghibur, populer dan baru.

Secara umum, alur penyajian buku ini mengalir dengan gaya penulisan *feature* dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Namun, sayangnya buku ini disajikan dengan struktur pembaban yang tidak memiliki jeda penghubung antar bab, sehingga membuat pembaca mengalami kebingungan. Terlepas dari hal tersebut, metode-metode pengumpulan data dalam pelaporan investigasi yang dijabarkan cukup memberikan banyak pandangan baru dalam pengumpulan data. (Pratiwi)

